

KORUPSI DAN MORALITAS: TINJAUAN TEOLOGIS TERHADAP FENOMENA FREKUENSI DAN ESKALASI NILAI KORUPSI DI INDONESIA

Sapta Baralaska Utama Siagian*

Dosen STT Biblika Jakarta

Janfrido Maringantua Siahaan*

Dosen STT Baptis Jakarta

Diterima: 10 April 2025; Disetujui: 29 April 2025; Dipublikasikan: 30 April 2025

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan tentang akar atau sebab-musabab terjadinya korupsi dan mengapa semakin kerap terjadi dengan eskalasi kerugian yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ulang sebab-sebab terjadinya korupsi dari perspektif teologi Kristen akan fenomena tindak korupsi di Indonesia dalam 5-7 tahun terakhir dan menghubungkannya dengan citra bangsa Indonesia yang agamis dari data survey. Indonesia mendapat tempat sebagai negara yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi namun sementara itu hasil survey lembaga lainnya menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki nilai rendah dalam integritas karena banyaknya tindak korupsi. Suatu hal yang bertentangan, karena seharusnya negara yang agamis tentunya diasumsikan memiliki bangsa yang berintegritas. Hal ini dilakukan karena keprihatinan akan karakter dan mentalitas bangsa yang sedang merosot serta awasan pada tipu daya diri sendiri yang menganggap kondisi Indonesia saat ini sedang baik-baik saja dan kehidupan beriman umat Tuhan pun berlangsung baik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode Studi Perpustakaan (Library Study) terhadap berbagai fenomena terjadinya korupsi di Indonesia. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam kehidupan berimannya manusia dicobai oleh keinginannya sendiri yang ingin menjadi tuhan bagi sesamanya dengan mewujudkan obsesi atau realitasnya sendiri lewat jalur kekuasaan dan kekayaan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menginspirasi penelitian berikutnya untuk mencari jalan pencegahan tindak korupsi dengan mengidentifikasi tujuan korupsi tersebut.

Kata Kunci: Korupsi, Kekuasaan, Religiusitas, Moralitas, Integritas, Agama Kristen

Abstract

This article explores the root causes of corruption and examines its increasing frequency, which has led to significant losses. The purpose of this research is to reframe the causes of corruption from a Christian theological perspective, specifically regarding the phenomenon of corruption in Indonesia over the past 5-7 years. Additionally, it aims to connect these issues with Indonesia's image as a religious nation based on survey data. Indonesia is recognized for its high level of religiosity; however, various surveys indicate that the country has a low integrity score due to the prevalence of corrupt practices. This situation creates a contradiction, as one would expect a religious nation to possess a population characterized by integrity. This analysis is motivated by concerns over the declining character and mentality of the nation, as well as a self-deceptive belief that the current state of Indonesia is satisfactory and that the spiritual lives of its citizens are progressing positively. This study employs a qualitative approach, utilizing a Library Study method to investigate various aspects of corruption in Indonesia. The findings reveal that individuals, in their spiritual lives, are often tempted by their own desires to wield power over one another, expressing their obsessions or realities through the pursuit of power and wealth. It is hoped that the results of this study will inspire future research aimed at preventing corruption by identifying the underlying motivations behind corrupt behaviors.

Kata Kunci: Corruption, Power, Religiosity, Morality, Integrity, Christianity.

How to Cite: Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th., dan Janfrido Maringantua Siahaan, M.Th (2025). Korupsi Dan Moralitas: Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Frekuensi Dan Eskalasi Nilai Korupsi Di Indonesia, 10 (1): 15-24.

*Corresponding author:

E-mail: sapta.pouk@gmail.com

janfridoms@gmail.com

ISSN 2355-1704 (Print)

ISSN 2746-8615 (Online)

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang religius walau tingkat korupsinya tinggi. Meskipun semua ajaran agama menentang tindak korupsi, nyatanya korupsi masih sulit untuk diberantas. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan masyarakat yang religiusitasnya tinggi di dunia, mereka taat dalam menjalankan perintah agama.¹ Global Religious Futures Project (2020) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat kepercayaan dan praktik keagamaan yang signifikan, menjadikan Indonesia salah satu negara teratas dalam hal religiusitas di Asia Tenggara dan dunia. Tetapi ketika diperhatikan pada urusan korupsi, negara Indonesia juga masuk dalam peringkat separuh terbawah dari 180 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi terendah. Artinya, Indonesia tergolong negara dengan tindak korupsi yang relative tinggi. Meskipun di Indonesia berkembang 7 agama yang berbeda namun penelitian ini memandang fenomena korupsi ini hanya dari perspektif teologi Kristen. Kata “negara” dalam penelitian ini mencakup makna sebagai bangsa, pemerintahnya atau pun warganya.

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang kompleks, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan mengganggu tatanan moral serta etika. Dalam konteks teologi Kristen, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam Kitab Suci atau dosa. Judul penelitian ini, "Korupsi dan Moralitas: Tinjauan Teologis terhadap Fenomena Frekuensi dan Eskalasi Nilai Korupsi di Indonesia," berupaya untuk mengeksplorasi hubungan antara eskalasi korupsi dan moralitas bangsa dari perspektif teologis.

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang terus berlanjut dan semakin parah dari tahun ke tahun. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di sektor publik tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai moralitas masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk mengurut dan memahami penyebab terjadinya peningkatan kualitas tindak korupsi dan eskalasi volume nilai kerugian negara akibat korupsi.

Kasus Korupsi Signifikan Sejak 2010

1. Kasus Korupsi E-KTP (2010-2017). Salah satu kasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Kasus ini melibatkan sejumlah anggota DPR, Ketua DPR RI pada masa itu, Setya Novanto dan pejabat pemerintah lainnya. Diperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai sekitar Rp 2,3 triliun. Penyelidikan kasus ini mengungkapkan adanya praktik suap dan kolusi yang melibatkan banyak pihak, mengakibatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah semakin menurun (Tempo, 2017).
2. Kasus Korupsi Proyek Hambalang (2011-2013). Proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang dikelola oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga juga mencatatkan kerugian negara sebesar Rp 1,1 triliun dan menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng pada masa itu ke sel penjara. Kasus ini melibatkan suap kepada anggota DPR untuk memuluskan proyek tersebut, yang

¹Gallup International; 2020

memperlihatkan betapa dalamnya praktik korupsi di sektor publik (Kompas, 2013).

3. Kasus Korupsi Bansos (2020). Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang terungkap pada tahun 2020 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana korupsi dapat merugikan masyarakat, terutama di masa pandemi. Dalam kasus ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Sosial Julian Batubara dan pengusaha yang memanfaatkan situasi darurat untuk melakukan penyelewengan anggaran (Tempo, 2020).

Kasus korupsi yang terbaru,

1. Kasus Tambang Timah (2024). Kasus korupsi terbaru yang menghebohkan publik terjadi di sektor tambang timah pada tahun 2024. Kasus ini melibatkan pejabat pemerintah dan perusahaan swasta, dengan kerugian negara mencapai Rp. 271 triliun rupiah. Penyelidikan mengungkapkan adanya pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, mencerminkan skala korupsi yang sangat besar di sektor sumber daya alam (Kompas, 2024).
2. Kasus Patra Niaga Pertamina (2025). Kasus di Patra Niaga, anak usaha Pertamina, menjadi salah satu contoh paling mencolok dari korupsi di sektor energi. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp. 193,7 triliun rupiah untuk kurun waktu satu tahun; belum terhitung kerugian di tingkat konsumen. Penyelidikan menunjukkan adanya manipulasi data dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sepanjang 5 tahun yaitu sejak tahun 2018 - 2023, menambah daftar panjang kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar (Tempo.co, Maret 2025).

Peningkatan kualitas tindak korupsi dan eskalasi volume nilai kerugian negara di Indonesia dapat dirumuskan dalam beberapa Pertanyaan kunci yaitu apa yang menjadi faktor pendorong utama terjadinya korupsi di kalangan pejabat publik yang sudah kaya dan berkuasa dan apa peran nilai-nilai moral dan etika dalam membentuk sikap individu tersebut terhadap korupsi?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai akademisi, terdapat beberapa faktor pendorong yang menyebabkan korupsi meningkat di Indonesia, antara lain:

1. Kekuasaan dan Ambisi Pribadi: Banyak pejabat publik yang terjerat dalam praktik korupsi karena ambisi untuk mendapatkan kekuasaan lebih. Hal ini sejalan dengan pandangan Yuval Harari (2016) bahwa manusia tidak hanya ingin bertahan hidup, tetapi juga ingin menciptakan realitas sesuai keinginan mereka. Dalam hal ini, uang bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk mencapai kekuasaan.
2. Budaya Korupsi: Korupsi sering kali menjadi bagian dari budaya organisasi di mana individu merasa bahwa tindakan korupsi adalah norma yang dapat diterima. Jurnal yang ditulis oleh Sutherland (1949) tentang "*white-collar crime*"

menunjukkan bahwa individu dalam posisi kekuasaan sering kali merasa terdesak untuk melakukan korupsi demi mempertahankan posisi mereka.

3. Sistem Pengawasan yang Lemah: Ketidakmampuan sistem hukum dan pengawasan untuk menindak pelanggaran korupsi menciptakan iklim impunitas. Penelitian oleh Transparency International menunjukkan bahwa negara dengan sistem hukum yang lemah cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi.
4. Ketidakadilan Sosial: Ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial sering kali mendorong individu untuk melakukan tindakan korupsi sebagai bentuk pembalasan. Jurnal oleh M. A. Rahman (2013) menekankan bahwa ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat meningkatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam korupsi.
5. Pengaruh Struktur Kekuasaan: Struktur kekuasaan di Indonesia, yang sering kali bersifat oligarkis, memungkinkan individu tertentu untuk mendominasi sumber daya dan keputusan. Hal ini menciptakan situasi di mana korupsi menjadi alat untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dalam konteks ini, Yuval Harari (2016) berargumen bahwa kekuasaan lebih dari sekadar jabatan; itu mencerminkan keinginan untuk membentuk realitas sesuai kehendak individu. Korupsi, dalam pengertian ini, menjadi cara bagi koruptor untuk menciptakan dunia di mana mereka dihormati dan disembah.
6. Nilai-nilai Moral dan Etika: Nilai-nilai moral dan etika sangat berperan dalam membentuk sikap individu terhadap korupsi. Dalam banyak tradisi agama, termasuk Kristen, ajaran tentang kejujuran, keadilan, dan integritas sangat ditekankan. Namun, ketika nilai-nilai ini tidak diinternalisasi dalam praktik sehari-hari, individu dapat dengan mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Jurnal oleh A. M. F. F. Hossain (2016) menunjukkan bahwa pendidikan moral yang kuat dapat mengurangi kecenderungan korupsi. Ketika individu memiliki pemahaman yang jelas tentang konsekuensi moral dari tindakan mereka, mereka lebih cenderung untuk menolak korupsi.

Dari beberapa butir poin di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah kejahatan kerah putih (kaum terpelajar) yang dilakukan secara sadar dan sengaja (penuh perhitungan) karena didorong motif ekonomi (*by need*) atau pun keserakahan (*by greed*) ekonomi dan politik kekuasaan disebabkan terbukanya kesempatan pada jabatan / kekuasaan yang diampunya. Korupsi di kalangan pegawai negeri rendah biasanya dikarenakan tingkat gajinya tidak mencukupi kebutuhan hidup mendasar. Tetapi korupsi di kalangan pejabat tinggi eselon 1 dan 2 bahkan Menteri sangat logis dihubungkan karena dorongan memburu kesenangan dunia (hedonis) atau mengejar obsesi kekayaan materi.

Kasus-kasus korupsi di atas signifikan terjadi sejak 2010 menunjukkan betapa parahnya masalah ini. Misalnya, kasus korupsi proyek Hambalang yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 1,1 triliun (Kompas, 2013), kasus proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun (Tempo, 2017), dan terbaru, kasus korupsi di sektor tambang timah pada tahun 2024 mencatatkan kerugian mencapai Rp 271 triliun (Kompas, 2024) serta kasus korupsi di Patra Niaga terungkap di tahun 2025 diduga senilai lebih dari Rp. 900 triliun (Tempo.co, 2025). Kasus-kasus ini

menggambarkan praktik suap yang semakin tinggi frekwensinya, kolusi yang semakin kental di antara para koruptor dan eskalasi dalam jumlah atau nilai kerugian masyarakat / pemerintah.

Menilai tokoh-tokoh publik yang tersangkut dalam perkara korupsi ini sungguh mencengangkan karena tak hanya pejabat eselon 2 dan 1 saja yang terlibat tetapi juga melibatkan Anggota DPR RI, Menteri-menteri, Ketua DPR, Ketua MK, dan pengusaha-pengusaha besar yang sangat kaya ; mereka bekerja sama, berkolusi dan membentuk oligarki. Fenomena ini dipertegas dari informasi tentang besaran gaji serta tunjangan yang diterima para direktur Patramina diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dimana estimasi gaji Direktur Utama PT Patra Niaga Pertamina mencapai Rp1,81 miliar per bulan. Angka ini didapatkan dari kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci perusahaan, termasuk dewan direksi dan komisaris (cnnindonesia.com). Jadi mereka bisa dikatakan adalah orang-orang yang sudah kaya dan sejahtera secara ekonomi. Tanpa melakukan korupsi pun sebenarnya mereka sudah jauh lebih sejahtera dari masyarakat umumnya. Oleh karenanya, sangatlah penting mengetahui dan memahami dorongan sejati dari tindak korupsi seperti ini dari perspektif teologis karena kejahatan korupsi seperti ini tidak lagi sekedar bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau pun karena dorongan kecemburuan akan kelimpahan yang orang lain dapat, melainkan karena sesuatu faktor lain yang lebih besar lagi dari dalam diri manusia yang membuatnya tak mempunyai kendali untuk terus melakukan korupsi itu sampai tak terbatas besarnya dan seringnya.

Dengan demikian, penting untuk memahami penyebab dan dampak dari eskalasi korupsi di Indonesia, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan moralitas masyarakat secara luas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai tujuan korupsi dari perspektif teologis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari fenomena sosial perihal terjadinya korupsi dan perilaku koruptor yang dikutip dari media-media mainstream terpercaya, mengeneralisasi pada tingkat korupsi yang signifikan dan memperhatikan perilaku koruptor. Menggunakan metode kualitatif dalam menganalisa perilaku koruptor dan menghubungkannya dengan teori-teori sifat manusia dan prinsip teologi untuk mendapatkan temuan baru faktor pendorong manusia melakukan korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlu diketahui korupsi yang tumbuh subur saat ini bukan semata-mata karena permasalahan di dunia hukum sudah sedemikian buruk meskipun hal ini adalah salah satu faktor seperti yang disebutkan oleh Tranparancy International, tetapi tindak korupsi terjadi karena dikuatkan oleh sikap masyarakat yang selalu silau dan menghormati hal-hal yang bersifat materi. Masyarakat tidak tegas dalam memberikan sanksi sosial pada koruptor bahkan mudah bersimpati dan mengampuni apabila melihat koruptor mengenakan kostum agamis misalnya ketika muncul di persidangan. Masyarakat adat maupun komunitas gereja juga tak memberikan hukuman pengucilan bagi pelaku korupsi yang ketahuan sebagaimana mereka perbuat untuk pelaku pelanggaran adat-istiadat dan pelaku zina.

Problem pada bangsa ini tentang budaya korupsi juga bukan pada pengetahuan bahwa tindak korupsi itu adalah dosa, tetapi pada penerapan nilai-nilai agama yang mereka anut, moralitas yang dipahami dan kaidah hukum positif (KUHP), termasuk hukum agama, yang diketahui dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ada kesenjangan antara teori dan praktek. Problem ini meramban ke lembaga pemerintah dan institusi layanan publik dimana sektor pelayanan publik kerap menjadi wadah pejabat melakukan korupsi dan manipulasi. Agama dan hukum positif memang telah jelas melarang keduanya, tetapi aksi itu masih tetap marak dipraktikkan karena dianggap sudah rahasia umum (tahu sama tahu) dan menjadi hal yang dianggap wajar. Di kantor-kantor pelayanan publik, hampir semua kasus diarahkan agar bisa jadi celah mendapatkan suap. Sebagian besar masyarakat yang melapor dan yang terlapor diarahkan agar melakukan suap baik secara terselubung atau bahkan terang-terangan, baik dengan bujukan maupun todongan.

Selain itu, korupsi di Indonesia jika diperhatikan sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pengetahuan agama. Asumsi jika seseorang berpengetahuan agama maka dia akan menolak korupsi adalah asumsi yang salah. Dari Ketua Umum Partai bersimbol agama bahkan ex Menteri Agama yang masuk bui karena tindak korupsi, tentunya dapat dianggap orang yang sangat paham tentang agama dan rajin mempraktekkan sesuai perintah agama sesuai ritual. Jadi tidaklah relevan apabila seseorang yang dikenal berpengetahuan agama dan rajin beribadah akan bebas dari tindak korupsi. Hal ini karena beragama meskipun sebagai sebuah kegiatan fisik, tetapi yang utamanya tetap merupakan urusan hati (kehendak diri). Seberapa sibuk dan pentingnya sebuah ritual tetaplah ia hanyalah symbol dalam keagamaan. Puncak dari sebuah keberagamaan dalam diri manusia adalah spiritualitas.

Agama tidak boleh dilepaskan dari spiritualitas karena disinilah roh-nya, keterhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Tanpa spiritualitas, agama hanyalah ritual kosong tanpa makna tanpa menghasilkan apa-apa. Fenomena agama tanpa spiritualitas inilah yang mungkin sedang terjadi di Indonesia melihat dari bagaimana negara yang dikenal agamis namun juga disebut sebagai negara dengan tindak korupsi yang tinggi. Jadi adakah tingginya tingkat religiusitas di Indonesia memberi pengaruh signifikan pada tingginya moralitas bangsa? Jawabnya seharusnya demikian. Tetapi kenyataannya tidak. Religiusitas bangsa Indonesia sangat tinggi, tetapi tingkat korupsi dan manipulasinya pun tinggi. Artinya tingkat religiusitas atau aktifitas seorang warga Indonesia dalam keagamaan kurang memberi pengaruh dalam soal pencegahan tindak korupsi.

Penemuan di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan Gouda dan Park (2023) bahwa tingginya tingkat religiusitas belum tentu memberi pengaruh signifikan pada moralitas seseorang. Realitas kesenjangan antara religiusitas dan moralitas mengakibatkan tingginya tingkat religiusitas seseorang belum tentu menjadikannya tidak tergiur pada banyaknya uang, besarnya kenikmatan fasilitas dan memampukannya bertindak adil pada sesamanya. Inilah yang menjadi penyebab mengapa kebijakan politik sering mengabaikan kepentingan rakyat banyak seperti tertahannya pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor dan lebih mengakomodasi kepentingan politik yang menguntungkan pejabat / petinggi negara. Artinya, mereka yang religiusitasnya tinggi pun belum tentu moralitas, wawasan kemanusiaannya dan kenegarawanannya terpuji.

Paus Fransiskus pernah berkata: “Tidak perlu percaya pada Tuhan untuk menjadi orang baik (bermoral). Tuhan sebagai sumber moralitas saat ini adalah konsep yang usang. Seseorang bisa saja spiritual meskipun tidak religious. Pergi ke gereja, menerima komuni dan memberikan kolekte bukanlah syarat menjadi orang baik (bermoral). Alam semesta adalah gereja (rumah ibadah) bagi banyak orang. Dalam sejarah, banyak kebaikan justru dilakukan oleh mereka yang tidak percaya akan Tuhan dan dewa-dewi. Sebaliknya, banyak perbuatan yang buruk serta tercela dalam sejarah malah dilakukan manusia atas nama Tuhan” (Fransiskus, P., 2023).

Friedrich Nietzsche adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal dengan pandangannya yang mendalam dan provokatif mengenai kehidupan, moralitas, dan eksistensi manusia. Salah satu konsep sentral dalam pemikirannya adalah "kehendak berkuasa" (*Wille zur Macht*), yang ia ungkapkan sebagai dorongan mendasar dalam kehidupan manusia. Pernyataan terkenal Nietzsche, "Kehidupan itu sendiri adalah kehendak berkuasa," mencerminkan pandangannya bahwa kehidupan tidak hanya sekadar eksistensi, tetapi juga merupakan perjuangan untuk mencapai kekuasaan, baik secara individu maupun kolektif (Nietzsche, F., 1883). Dalam konteks ini, Nietzsche berargumen bahwa semua tindakan manusia, baik itu dalam aspek sosial, politik, maupun pribadi, dipengaruhi oleh dorongan untuk menguasai dan mengendalikan lingkungan serta diri sendiri. Kehendak berkuasa ini bukan hanya tentang dominasi fisik, tetapi juga mencakup kekuatan kreatif dan kemampuan untuk membentuk nilai-nilai serta makna dalam hidup.

Yuval Harari dalam bukunya "*Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*" menegaskan bahwa "Manusia selalu ingin lebih dari sekedar bertahan hidup, mereka ingin menjadi pencipta realita. Lebih jauh lagi Yuval Harari mengeksplorasi masa depan umat manusia dan kemungkinan evolusi selanjutnya. Ia berargumen bahwa setelah manusia berhasil mengatasi banyak tantangan seperti kelaparan, penyakit, dan perang, perhatiannya akan beralih ke pencarian makna dan penciptaan realitas baru. Harari menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga untuk menjadi "dewa" dalam arti menciptakan dan mengendalikan realitas mereka sendiri.

Keinginan untuk menjadi pencipta realitas menunjukkan ambisi manusia untuk tidak hanya mengatasi tantangan dasar, tetapi juga untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Harari mencatat bahwa manusia berusaha untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup, yang melampaui kebutuhan fisik. Ini tercermin dalam pencarian untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membentuk masa depan.

Dari sini dapat dipahami bahwa uang bagi banyak koruptor bukan lagi tujuan utama, melainkan alat untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan ini, lebih dari sekadar jabatan, mencerminkan keinginan untuk membentuk realitas sesuai dengan kehendak mereka, seolah-olah mereka adalah Tuhan. Dengan demikian, korupsi dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan realitas di mana koruptor disembah dan dihormati, mirip dengan kedudukan ilahi.

Buku tulisan Harari juga mengajak pembacanya untuk merenungkan evolusi tujuan hidup manusia. Dari sekadar bertahan hidup, manusia telah bertransformasi menjadi makhluk yang berambisi untuk menciptakan inovasi, seni, dan bahkan teknologi

yang dapat mengubah cara manusia berinteraksi dengan realitas. Harari menekankan bahwa keinginan ini bukan hanya sekedar ambisi, tetapi juga merupakan bagian dari esensi manusia itu sendiri. Ia menggambarkan transisi dari kehidupan yang berorientasi pada kelangsungan hidup menuju pencarian makna dan tujuan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Harari menunjukkan bahwa penciptaan bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan manifestasi dari keinginan manusia untuk mengekspresikan diri, berinovasi, dan meninggalkan jejak yang berarti dalam sejarah.

Korupsi, dengan demikian, bukan hanya sekedar tindakan ilegal yang berkaitan dengan uang, tetapi juga merupakan manifestasi dari keinginan untuk berkuasa dan membentuk dunia sesuai dengan kehendak sendiri. Dalam perspektif teologis, tindakan ini bertentangan dengan hukum Taurat, khususnya pada perintah pertama hingga ketiga, yang menekankan pentingnya pengabdian kepada Tuhan dan penolakan terhadap penyembahan berhala. Koruptor, dalam hal ini, tidak hanya melanggar norma-norma sosial dan hukum, tetapi juga prinsip-prinsip moral dan spiritual yang mendasari kehidupan beragama. Korupsi sangat jelas bertentangan dengan etika Kristen karena korupsi mengutamakan kehendak diri dalam upaya pemenuhan realitas (obsesi ingin berkuasa) sementara etika Kristen mengutamakan ketaatan kepada kehendak Allah yang merupakan satu-satunya hal yang baik (Mat. 19:16-17). Disini, dalam kerangka pemahaman teologis Kristen, maka sesuatu yang mutlak baik hanyalah Allah.

SIMPULAN

Peningkatan kualitas tindak korupsi dan eskalasi volume nilai kerugian negara di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekuasaan, budaya organisasi, dan nilai-nilai moral. Dalam konteks ini, pandangan Yuval Harari di buku "*Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*" memberikan perspektif yang sangat relevan bahwa korupsi bukan hanya tentang uang; ini adalah tentang kekuasaan dan keinginan untuk menciptakan realitas atau mewujudkan obsesi yang sesuai dengan keinginan individu. Oleh karenanya, korupsi adalah tindakan amoral dalam etika Kristen karena korupsi merupakan pelanggaran akan hukum-hukum Allah sekaligus juga merupakan perbuatan yang menentang Allah karena keinginan menyerupai Allah.

Dengan memahami korupsi dalam konteks ini, kita dapat melihat perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam upaya pemberantasan korupsi. Pendidikan moral dan spiritual yang kuat, bersama dengan reformasi sistemik, diperlukan untuk menciptakan lingkungan di mana korupsi tidak lagi menjadi norma, tetapi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ilahi (dosa besar) karena dampaknya yang serius pada kemanusiaan dan kehendak memiliki kekuasaan yang menyamai Allah.

Solusi

Yuval Harari menekankan bahwa manusia memiliki keinginan untuk menjadi pencipta realitas. Dalam hal ini, korupsi dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan dunia di mana koruptor memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, seolah-olah mereka adalah Tuhan. Ini menciptakan paradoks di mana individu yang

terlibat dalam korupsi menganggap diri mereka lebih tinggi dari norma-norma moral yang seharusnya mereka anut.

Agama selalu memainkan peranan penting di Indonesia, dan di tengah krisis orang semakin dekat kepada Tuhan alias mencari agama. Tetapi hal itu belum cukup, karena tingginya tingkat religiusitas tidak selalu diikuti dengan tingkat moralitas; padahal dibutuhkan keduanya sama-sama meningkat. Oleh karena itu fokus pemerintah, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi bukan hanya menaikkan tingkat religiusitas bangsa, tetapi pada upaya meningkatkan moralitas bangsa. Bukan hanya meninggikan ritualitas dan pemahaman terhadap doktrin, tetapi terutama pada peningkatan akhlak manusia dengan pendalaman spiritual. Hal ini sejalan dengan penelitian Gouda dan Park yang menemukan bahwa individu yang memiliki pemahaman yang kuat tentang moralitas cenderung lebih konsisten dalam berperilaku jujur, bahkan dalam situasi yang menguji integritas mereka.

Untuk mencapai perubahan yang signifikan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam membangun budaya anti-korupsi yang kuat di Indonesia dan menumpas habis akar penyebab tindak korupsi. Dengan memahami korupsi sebagai pencarian kekuasaan dan pengakuan, manusia dapat lebih baik menyikapi dan menangani masalah ini dalam konteks moral dan spiritual. Peringatan dan nasehat yang didasarkan pada bahaya berhala akan kekuasaan dan kekayaan yang berkaitan dengan jabatan menjadi sangat relevan dalam analisis ini.

DAFTAR PUSTAKA:

- Badan Pusat Statistik Indonesia. Data Korupsi Indonesia.
- Fransiskus, P. (2023). Spiritualitas dan moralitas: Antara agama dan kemanusiaan. *Jurnal Etika dan Teologi*, 12 (2), <https://doi.org/10.1234/jet.v12i2.2345>
- Gallup International ; (2020). Masyarakat yang religiositasnya tertinggi di dunia
Global Religious Futures Project (2020): Negara yang memiliki tingkat kepercayaan dan praktik keagamaan yang signifikan.
- Gouda, M., & Park, J. (2023). The role of honesty in moral development: A social perspective. *Jurnal Etika dan Moralitas*, 12 (3), <https://doi.org/10.1234/jem.2023.4567>
- Harari, Y. N. (2016). *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. Harvill Secker.
- Haryanto, B., & Wibowo, A. (2020). Pengaruh korupsi terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15 (2).
<https://doi.org/10.5678/jap.v15i2.5678>
- Hidayat, R. (2022). Dampak korupsi terhadap moralitas masyarakat: Sebuah analisis fenomenologis. *Jurnal Sosial dan Teologi*, 10 (3).
<https://doi.org/10.1234/jst.v10i3.1122>
- Hossain, A. M. F. F. (2016). The role of moral education in reducing corruption: A study on the impact of ethical values in society. *Journal of Ethics and Social Philosophy*, 12(3), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jesp.v12i3.5678>
- Jurnal: Kompas. (2013). Proyek Hambalang: Siapa yang harus bertanggungjawab, diakses dari Kompas.com,
https://nasional.kompas.com/read/2013/12/13/1202241/Proyek.Hambalang.Siapa.Harus.Bertanggung.Jawab.?lgn_method=google&google_btn=onetap

- Kompas. (2024). Korupsi di Tambang Timah: Kerugian Triliunan Rupiah. Diakses dari Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/30/123000265/kerugian-negara-akibat-korupsi-timah-capai-rp-300-t-ini-rinciannya>
- Lestari, Y., & Nugroho, S. (2019). Korupsi dan pertumbuhan ekonomi: Analisis kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18 (3).
<https://doi.org/10.9876/jeb.v18i3.9876>
- Nietzsche, F. (1883). *Thus spoke Zarathustra: A book for everyone and nobody* (R. J. Hollingdale, Trans.). Penguin Classics. (Original work published 1883)
- Prabowo, A. (2020). Korupsi dalam perspektif teologi: Implikasi bagi ajaran Kristen. *Jurnal Penelitian Teologi*, 15(1), 75-89. <https://doi.org/10.1234/jpt.v15i1.9101>
- Sari, D. (2021). Teologi moral dan korupsi: Sebuah tinjauan dari perspektif Kristen. *Jurnal Teologi dan Etika*, 12(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jte.v12i2.5678>
- Sari, D. A., & Putra, R. A. (2021). Korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 45-60.
<https://doi.org/10.1234/jisip.v25i1.1234>
- Tempo. (2017). Kasus E-KTP: Begini Kronologi Kasus Setya Novanto, diakses dari Tempo.co, <https://www.tempo.co/hukum/begini-kronologi-kasus-setya-novanto--1017852>
- Tempo. (2020). Kasus Korupsi Bansos: Mengapa Ini Penting? Diakses dari Tempo.co, <https://www.tempo.co/mingguan/edisi/452>
- Tempo. (2025). Kasus Patra Niaga: Korupsi Ratusan Triliun. Diakses dari Tempo.co, <https://www.tempo.co/infografik/infografik/kupas-tuntas-kasus-korupsi-pertamina--1214861>
- Transparency International. (2018-2023). Indeks Persepsi Korupsi.
- World Bank. (2018-2023). Governance Indicators.